



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 3994230 (20 SALURAN) PSW 5200.5204, (021) 3450959, 3865130 FAKSIMILI : (021) 3846402
SITUS : www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- **1152** /PB/2019 Jakarta, **18** September 2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN
Periode III Tahun 2019

Yth. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian Negara/Lembaga
(Terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada satuan kerja pengelola APBN Periode III Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan pengumuman nomor: PENG- /PB/2019 tanggal September 2019 tentang Hasil Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode III Tahun 2019. Pengumuman dimaksud dapat dilihat melalui Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) Sertifikasi Bendahara setempat atau situs <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id>.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk:
 - a. Menginformasikan kepada satuan kerja lingkup masing-masing Kementerian Negara/Lembaga bahwa para peserta yang namanya tercantum dalam pengumuman dimaksud diberikan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register. Pengambilan Sertifikat Bendahara dilakukan di UPS Sertifikasi Bendahara Periode III Tahun 2019 (tempat peserta mendaftar program Sertifikasi Bendahara) paling cepat **terhitung mulai 1 (satu) bulan sejak tanggal pengumuman** dengan menunjukkan identitas diri atas nama yang bersangkutan (daftar terlampir).
 - b. Meningkatkan partisipasi bendahara/calon bendahara pada satuan kerja lingkup masing-masing Kementerian Negara/Lembaga untuk mengikuti Sertifikasi Bendahara periode berikutnya pada Tahun 2019 dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016.
3. Informasi lebih lanjut terkait dengan hasil Sertifikasi Bendahara dapat diperoleh dengan menghubungi Sekretariat Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara melalui telepon: (021) 3846822 atau *e-mail*: sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id atau UPS setempat.



a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Sistem Perbendaharaan,

Agung Yulianta

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Mahkamah Agung;
3. Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Kementerian Sekretariat Negara;
5. Kementerian Dalam Negeri;
6. Kementerian Luar Negeri;
7. Kementerian Pertahanan;
8. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
9. Kementerian Keuangan;
10. Kementerian Pertanian;
11. Kementerian Perindustrian;
12. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Kementerian Perhubungan;
14. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Kementerian Kesehatan;
16. Kementerian Agama;
17. Kementerian Ketenagakerjaan;
18. Kementerian Sosial;
19. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
20. Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
21. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
22. Kementerian Pariwisata;
23. Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;
24. Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah;
25. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
26. Badan Pusat Statistik;
27. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN;
28. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
29. Kementerian Komunikasi Dan Informatika;
30. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
31. Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
32. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
33. Badan Narkotika Nasional;
34. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi;
35. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;
36. Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika;
37. Komisi Pemilihan Umum;
38. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
39. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
40. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
41. Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional;
42. Badan Standardisasi Nasional;
43. Badan Pengawasan Tenaga Nuklir;
44. Lembaga Administrasi Negara;

45. Arsip Nasional Republik Indonesia;
46. Badan Kepegawaian Negara;
47. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
48. Kementerian Perdagangan;
49. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
50. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
51. Badan SAR Nasional;
52. Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
53. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; dan
54. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.